

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, dalam melakukan Untuk mengatasi masalah utama dengan efektif, penting untuk menyelidiki dan memahami keterkaitan antara berbagai konsep dan teori. Dalam tinjauan literatur ini, kami menyelidiki dan meninjau berbagai studi ilmiah sebelumnya yang relevan. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk menggunakan penelitian-penelitian tersebut sebagai referensi dan titik perbandingan untuk penelitian kami sendiri, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti pada topik yang sama.

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama adalah Skripsi yang Berjudul “*Analisis Pengaruh Gerakan Black Lives Matter Terhadap Kebijakan di Amerika Serikat Pada Tahun 2013-2014*” yang ditulis oleh Nur Maghfirah dari Universitas Islam Indonesia Peneliti mengemukakan mengenai bagaimana Adanya tindakan rasisme dan diskriminasi membuat masyarakat kulit hitam merasa terancam di Amerika Serikat. Sehingga, dengan melakukan gerakan sosial masyarakat kulit hitam berharap adanya keadilan. Gerakan ini dimulai pada tahun 2013, yaitu gerakan *Black Lives Matter* untuk menanggapi pembunuhan dan penembakan yang dilakukan oleh polisi kulit putih terhadap masyarakat kulit hitam.

Maka, penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh gerakan *Black Lives Matter* terhadap masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat pada tahun 2013-2020. Penelitian ini menggunakan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) oleh

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. Strategi yang dimiliki oleh TAN untuk mencapai tujuan NGO, yaitu politik informasi, politik simbolis, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas.

Implementasi *Black Lives Matter* dalam konsep TAN untuk mencapai hak-hak masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat dipengaruhi oleh *International Conferences/Contact*. TAN memiliki empat tipologi taktik, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Dalam teori ini, empat tipologi taktik tersebut digunakan oleh jaringan TAN untuk meyakinkan kampanye gerakan *Black Lives Matter* agar mencapai tujuan kesetaraan masyarakat kulit hitam.

Persamaan Penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada rasisme di Amerika Serikat telah dicirikan oleh banyak insiden yang melibatkan aparat penegak hukum dan gerakan *#BlackLivesMatter*, yang berjuang untuk mendorong keadilan dan kebebasan dalam menghadapi diskriminasi rasial terhadap orang kulit hitam. Kasus-kasus ini telah mengungkapkan kelemahan sistem hukum AS dalam menangani diskriminasi dengan efektif. Salah satu peristiwa yang memicu kemarahan publik adalah penembakan Trayvon Martin oleh seorang sukarelawan pada tahun 2012. Serta Tujuan utama gerakan ini adalah mendorong reformasi dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan kesetaraan dan perlindungan dari diskriminasi di bidang ekonomi, politik, dan hukum.

Penelitian Kedua Jurnal yang berjudul “*Resonansi Black Lives Matter di Australia*” yang ditulis oleh Frisca Alexandra dan Rahma Daniah Di tahun 2020,

Gerakan *Black Lives Matter* kembali menyita perhatian masyarakat internasional. Gerakan yang bermula di Amerika Serikat itu kini beresonansi hingga ke Australia. Australia sendiri memiliki sejarah panjang terkait kasus diskriminasi rasial terhadap masyarakat suku Aborigin.

Meskipun pemerintah Australia telah secara resmi menyatakan permintaan maaf terkait kebijakan diskriminasi rasial dimasa lampau serta melakukan sejumlah upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat suku Aborigin namun nyatanya, kehidupan masyarakat suku Aborigin masih jauh dari kata sejahtera. Bahkan angka kematian masyarakat suku Aborigin di dalam penjara menjadi yang tertinggi diseluruh dunia.

Persamaan Penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada masyarakat Australia menuntut keadilan bagi etnis Aborigin yang selama ini kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi rasial dari pemerintah Australia, terutama bagi etnis Aborigin yang mengalami tindak kekerasan hingga berujung pada kematian ketika sedang berada dalam penahanan kepolisian Australia. Gelombang aksi protes *Black Lives Matter* yang beresonansi hingga ke Australia, sempat mengejutkan sebagian publik Australia dan juga elit politik di Australia.

Penelitian ke Tiga Jurnal yang Berjudul “Diskriminasi Ras dan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat: Studi Kasus Pembunuhan George Floyd” yang ditulis oleh Oktoviana Banda Saputri, Amerika Serikat memiliki sejarah kelam mengenai konflik rasial antara orang kulit putih dan orang kulit hitam selama kurang lebih tiga abad lamanya. Kasus yang terjadi terhadap orang kulit hitam bernama George

Floyd di Amerika Serikat memiliki atensi yang sangat tinggi untuk masyarakat Amerika Serikat bahkan dunia. Hal tersebut dikarenakan orang kulit hitam sering kali menjadi korban tindakan diskriminatif orang kulit putih.

Masyarakat kulit putih Amerika Serikat sulit untuk mengasimilasi orang kulit hitam, dikarenakan awal kedatangan orang kulit hitam ke Amerika Serikat hanya sebagai budak pekerja, sehingga terbentuk pola pikir mengenai orang kulit hitam sebagai warga negara kelas dua yang menjadi sebuah sikap dalam stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Penelitian ini ingin menganalisis mengenai fenomena diskriminasi ras dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta penyelesaian kasus hukum yang terjadi di Amerika Serikat.

Persamaan Penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada Kematian Floyd kemudian memicu demonstrasi di berbagai negara seperti Selandia Baru, dan Australia. Mereka menuntut keadilan terhadap pria kulit hitam tak bersenjata yang meninggal dalam penahanan tersebut. Selanjutnya, peristiwa ini memicu aksi dalam solidaritas dengan melakukan demonstrasi di AS, dan bersatu untuk mengutuk pembunuhan George Floyd. Peristiwa tersebut memberikan tambahan bukti bahwa HAM belum diberlakukan secara merata di AS. Faktor ekonomi, hukum, pendidikan sosial, dan budaya tidak dipandang sebagai suatu hak. Kebijakan publik dapat mengecualikan hak seseorang dari kelayakan selama mereka tidak melakukan diskriminasi dengan alasan yang dilarang, misalnya ras.

Penelitian Keempat Jurnal yang Berjudul “*Kebebasan Masyarakat dari Diskriminasi di Negara Amerika*” yang ditulis Oleh Nadya Zerlinda Febrianti

Diskriminasi adalah seseorang atau sekelompok orang yang melukai korbannya karena kekurangan pada diri korban. Diskriminasi rasisme di Amerika sudah ada sejak lama. Diskriminasi ini muncul dari ras, warna kulit, hingga komunitas agama. Diskriminasi rasial warna kulit berasal dari Afrika Amerika. Meskipun pada awalnya hak-hak sipil Afrika-Amerika telah memberikan larangan diskriminasi rasial dari perjanjian multilateral 1965.

Persamaan Penelitian diatas yaitu Besarnya diskriminasi yang dilaporkan di beberapa bidang kehidupan menunjukkan adanya pola diskriminasi yang luas terhadap orang kulit hitam di Amerika, Diskriminasi adalah seseorang atau sekelompok orang yang melukai korban karena kekurangan yang ada pada diri korban. Diskriminasi rasisme di Amerika sudah ada sejak lama. Diskriminasi ini muncul dari ras, warna kulit, hingga komunitas agama.

Diskriminasi ras dari warna kulit berasal dari orang Afrika-Amerika. lebih dari sekadar pengalaman yang terisolasi. Kesenjangan kulit hitam-putih terjadi pada hampir semua dimensi pengalaman dengan institusi publik dan swasta, termasuk layanan kesehatan dan kepolisian. Bukti diskriminasi sistemik menunjukkan perlunya intervensi kelembagaan yang lebih aktif untuk mengatasi rasisme dalam kebijakan dan praktik.

Penelitian Kelima Jurnal yang berjudul “*Pengaturan Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia dan Penerapan Terhadap Perlindungan suku Aborigin di Australia*” yang ditulis oleh Ezri Agung Iskandar Prinsip-prinsip umum terkait hak asasi manusia dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights,

Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kategori berat atau bukan, menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Aborigin di Australia.

Suku Aborigin merupakan suku asli Australia yang mengalami diskriminasi sejak dahulu kala. Rumusan masalah : Bagaimanakah aturan hukum internasional mengenai hak asasi manusia (HAM) khusus nya terhadap perlindungan penduduk asli minoritas dalam suatu Negara Bagaimanakah penerapan aturan mengenai hak asasi manusia (HAM) terhadap perlindungan suku aborigin di Australia.

Persamaan Penelitian diatas Komisi Hak Asasi Manusia Australia telah aktif terlibat dalam berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kematian orang Aborigin di penjara. Salah satu inisiatif utama mereka adalah memberikan pendidikan kepada kaum muda Aborigin mengenai sistem peradilan Australia, dengan tujuan akhir mencegah mereka terlibat dalam masalah hukum. Selain itu, komisi sering memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Australia mengenai sistem peradilan dan mengadvokasi pengurangan hukuman serta sanksi yang lebih adil bagi orang Aborigin.

Konvensi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR) adalah dasar hukum internasional yang digunakan oleh semua negara anggota PBB untuk mengatur hak asasi manusia di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).

## 2.2 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional dan Konsep Kepentingan Nasional.

### 2.2.1 Teori Gerakan Sosial Baru (GSB)

Gerakan Sosial Baru (GSB) bukanlah hal baru di era sekarang. Setelah muncul pada tahun 1960-an hingga 1970-an, Gerakan Sosial Lama atau Klasik (GSB) adalah perkembangan dari gerakan tersebut. Pada saat itu, masyarakat di Amerika dan Eropa menyaksikan dan menyadari adanya gerakan besar yang berkaitan dengan masalah kultural, humanis, dan nonmaterialistik. Semua orang dapat mengambil bagian dalam gerakan ini, yang memiliki cakupan universal, dan dilakukan untuk mempertahankan esensi kemanusiaan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Gerakan sosial "baru" tidak terlibat dalam perdebatan ideologis seperti "anti kapitalisme", "revolusi kelas", atau "perjuangan kelas". Ini membedakannya dari gerakan "klasik" sebelumnya.

GSB memiliki banyak persamaan dengan gerakan sosial klasik. Gerakan transnasional GSB berbicara, mengarahkan, dan berjuang untuk berbagai masalah terkait. Ini memiliki banyak bentuk dan tujuan, termasuk anti-rasisme, anti nuklir, pelucutan senjata, feminisme, lingkungan, dan kebebasan sipil. Banyak perjuangan modern, seperti gerakan anti-rasisme, feminisme, dan lingkungan, bukanlah representasi dari gerakan kelas. Mereka lebih berinteraksi antara kelas. Identitas para aktor atau pendukung gerakan sosial baru tidak dipengaruhi oleh latar belakang

mereka. Secara umum, GSB melakukan tindakan berbasis masyarakat dan politik akar rumput.<sup>17</sup>

Dengan demikian, Penulis menganalisis isu rasisme dan Gerakan *Black Lives Matter* dengan Teori Gerakan Sosial Baru dalam membantu untuk memahami dinamika kompleks gerakan sosial kontemporer, serta bagaimana gerakan tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi, jaringan sosial, dan partisipasi publik yang lebih luas dalam upaya mereka untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan.

Teori Gerakan Sosial Baru juga menyoroti partisipasi publik yang lebih luas dan inklusif dalam gerakan sosial. BLM telah berhasil memobilisasi orang dari berbagai latar belakang sosial, etnis, dan budaya untuk berpartisipasi dalam protes dan mendukung perjuangan mereka melawan rasisme sistemik. Analisis dengan kerangka kerja ini dapat membantu menjelaskan bagaimana gerakan ini mampu memperluas basis dukungan mereka.

Untuk mengaplikasikan teori gerakan sosial baru dalam isu rasisme, Penulis mengikuti beberapa langkah penting, Teori gerakan sosial baru (*New Social Movement Theory*) menekankan pada perubahan sosial yang tidak hanya terbatas pada tuntutan ekonomi atau politik tradisional, tetapi juga mencakup isu-isu identitas, budaya, dan lingkungan dan salah satu nya Memobilisasi Jaringan dan Aliansi yaitu Bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki minat serupa dalam mengatasi isu rasisme. Ini bisa melibatkan kelompok-kelompok

---

<sup>17</sup> <http://repositori.unsil.ac.id/3535/5/BAB%20II.pdf>



aktivis, organisasi non-pemerintah, atau bahkan individu-individu yang memiliki pengaruh dalam masyarakat.

### 2.2.2 Teori Konstruktivisme

Dalam konstruktivisme, aspek sosial memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan praktik politik global. Adapun aspek sosial yang dimaksud ialah ide dan norma yang ditafsirkan secara beragam oleh para konstruktivis itu sendiri. Perbedaan itulah yang kemudian menjadikan konstruktivisme terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran konvensional dan aliran kritis. Konstruktivisme konvensional meyakini adanya kekuatan dan kepentingan material aktor dalam sistem internasional yang anarkis.

Pemikir konstruktivisme konvensional membuktikan bahwa identitas aktor memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding kapabilitas dan kepentingan strategis negara. Sedangkan konstruktivisme kritis lebih menekankan revisi dan reformasi terhadap kelemahan teori neo-neo yang tidak memberi ruang bagi eksplorasi diskursus kritik sosial. Akan tetapi, pada dasarnya kedua aliran tersebut tetap berpegang teguh pada prinsip yang sama dalam memahami dunia, yakni sebagai proyek yang sedang 'dibangun' oleh individu atau negara, bukan sebagai hal yang given atau telah 'diberi'.

Konstruktivisme memfokuskan pandangannya mengenai bagaimana ide-ide mampu mendefinisikan dan dapat mengubah organisasi politik dunia serta menentukan apa yang dianggap sebagai tindakan yang sah. Baik struktur maupun

aktor, keduanya saling membentuk antara satu sama lain yang berarti hal ini dikenal sebagai bentuk dari teori strukturasi. Struktur dapat membentuk identitas melalui tiga mekanisme, yaitu melalui imajinasi, komunikasi, dan hambatan.

Sedangkan aktor dapat mempengaruhi terbentuknya struktur melalui interaksi-interaksi yang dilakukan secara reciprocal atau timbal-balik (Reus-Smit 2001). Identitas merupakan konsep yang krusial bagi konstruktivisme dalam menjelaskan kepentingan nasional dan pengaruh identitas tersebut terhadap pembuatan kebijakan. Identitas akan menciptakan peran tertentu bagi aktor sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan peran yang mereka miliki.

Identitas dianggap sebagai hal yang penting karena identitas bukanlah hal yang lahir dengan sendirinya, melainkan hal yang telah terkonstruksi dari kultur dan norma dalam suatu negara. Kultur ini memahami adanya peran penting dalam membuat cara pandang suatu negara dalam berbagai aspek permasalahan dunia internasional. Sejalan dengan proposisi konstruktivisme konvensional, identitas aktor – individu, negara, maupun non-negara– memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam suatu fenomena hubungan internasional. Dalam sistem yang anarki ini, dijelaskan pula bahwa disamping kuatnya pengaruh identitas aktor, terdapat kepentingan tertentu yang melandasi setiap tindakan aktor tersebut.

Selain itu, nilai, norma, dan ekspektasi, juga merupakan tiga hal yang turut menjadi bahan analisis dari konstruktivisme. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, penulis akan menggunakan konstruktivisme sebagai kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh identitas artis-artis mancanegara

terhadap gerakan BLM dalam kasus pembunuhan George Floyd serta alasan mengapa mereka mau untuk turut andil dalam gerakan ini.<sup>18</sup>

Dengan demikian Penulis menggunakan Teori Konstruktivisme dalam memahami pengaruh kebijakan Amerika Serikat (AS) dan Australia dalam perlindungan hak asasi manusia pada resonansi Gerakan *Black Lives Matter* (BLM) adalah pendekatan yang relevan karena teori ini fokus pada bagaimana norma, nilai, dan persepsi sosial memengaruhi tindakan aktor-aktor internasional. Dalam konteks ini, teori konstruktivisme dapat membantu kita memahami dampak norma dan perubahan dalam opini publik terhadap isu rasial dan hak asasi manusia dalam politik luar negeri kedua negara ini.

Penulis menggunakan teori konstruktivisme karena relevan dalam konteks menekankan peran norma-norma dan persepsi sosial dalam membentuk perilaku aktor-aktor internasional. Gerakan BLM telah menjadi platform penting untuk mengubah norma-norma dan persepsi sosial seputar isu-isu rasial dan hak asasi manusia di AS dan Australia. Pada gilirannya, perubahan dalam norma-norma ini dapat memengaruhi sikap dan tindakan pemerintah AS dan Australia terkait dengan isu-isu tersebut.

Dan juga Teori konstruktivisme juga mencakup konsep diplomasi publik, yang mengacu pada upaya aktor-aktor internasional untuk memengaruhi opini publik global dan nasional. Gerakan BLM telah menggunakan media sosial dan kampanye kesadaran untuk mengekspos isu-isu hak asasi manusia dan rasial.

---

<sup>18</sup> <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jsih/article/download/1696/1630>

Kebijakan AS dan Australia dalam menghadapi tuntutan-tuntutan Gerakan BLM dapat dipengaruhi oleh tekanan dari opini publik yang telah terbentuk melalui diplomasi publik

### 2.2.3 Konsep Transnational Advocacy Network

Salah satu alasan penggunaan konsep *Transnational Advocacy Network* dalam gerakan *Black Lives Matter* (BLM) di Amerika Serikat adalah karena BLM berhasil membangun jaringan advokasi yang melintasi batas negara dan bekerja sama dengan kelompok dan individu di seluruh dunia yang memiliki tujuan yang sama. Konsep ini menyoroti pentingnya kerjasama dan koneksi antara kelompok dan individu di berbagai negara dalam memperjuangkan isu-isu global.

Dalam konteks BLM, gerakan ini telah berhasil membangun solidaritas dengan gerakan hak asasi manusia, kelompok aktivis, dan masyarakat di luar Amerika Serikat untuk memperjuangkan kesetaraan rasial dan keadilan sosial. Selain itu, menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* membantu BLM dalam memobilisasi dukungan dan meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu yang mereka perjuangkan. Mereka dapat berkolaborasi dengan organisasi-organisasi internasional, mengadakan kampanye bersama, dan memanfaatkan platform global untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Penulisan ini mengusulkan untuk menerapkan Landasan konseptual berupa *Transnational Advocacy Network* (TAN), yang dipopulerkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, sebagai dasar pendekatan dalam mencapai tujuan dan nilai bersama. TAN merupakan suatu jaringan yang menghubungkan para aktivis

individu dan kelompok yang berfokus pada isu tertentu. Jaringan ini bertujuan untuk mencapai solusi dalam isu-isu tersebut tanpa menggunakan kekerasan militer atau cara lainnya.

Sebagai jaringan advokasi, TAN memberikan dukungan pada gagasan dan individu yang mendukung pandangan mereka. Anggota jaringan ini bekerja bersama secara terorganisir, dan masing-masing individu berperan memberikan saran dalam kebijakan. Salah satu pola yang dikenal dalam TAN disebut "bumerang," yang berarti jika hubungan antara aktor jaringan dan pemerintah mengalami penolakan atau hambatan, TAN masih memiliki jaringan transnasional yang mampu mempengaruhi perubahan perilaku negara. Dengan pola bumerang ini, TAN mampu mencapai tujuan advokasi dengan efektif. Strategi yang digunakan oleh TAN dalam menganalisis proses advokasi meliputi politik informasi, politik simbolis, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas.

Dalam konteks gerakan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat, konsep TAN memegang peran penting dalam mencapai hak-hak masyarakat kulit hitam. Gerakan ini juga dapat mempengaruhi perubahan dalam pemerintahan yang telah lama melakukan tindakan diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat kulit hitam. Pengaruh TAN dalam hal ini dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam *International Conferences* atau *International Contact* yang mencakup lingkup nasional dan internasional.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16417/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Demikian Penulis Menggunakan konsep *Transnasional Advocacy Network* dalam analisis isu pengaruh kebijakan Amerika Serikat (AS) dan Australia dalam perlindungan hak asasi manusia dalam konteks gerakan Black Lives Matter memiliki beberapa alasan penting. Dan juga mempunyai alasan mengapa pendekatan ini bermanfaat yaitu dengan Keterkaitan Global, *Transnasional Advocacy Network* membantu mengidentifikasi dan memahami bagaimana isu hak asasi manusia terkait dan saling memengaruhi di berbagai negara. Dalam konteks *Black Lives Matter*, AS dan Australia adalah dua negara yang memiliki sejarah dan konteks yang berbeda, tetapi kedua negara ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan gerakan tersebut.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



## **Upaya Amerika Serikat terhadap Australia dalam menegakan keadilan Hak Asasi Manusia pada resonansi Gerakan *Black Lives Matter***

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis fenomena diskriminasi berdasarkan ras dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta penanganan kasus hukum terkait di Amerika Serikat dan Australia. Melalui telaah literatur dan analisis dari berbagai sumber ilmiah, didapatkan kesimpulan bahwa Pemerintah Amerika Serikat dan Australia belum mencapai sepenuhnya keadilan dalam menghormati Hak Asasi Manusia, terutama dalam merespons Gerakan *Black Lives Matter* dan menghadapi pelanggaran HAM. Kedua negara ini masih memiliki kebijakan yang bersifat diskriminatif, bahkan meskipun Amerika Serikat memiliki reputasi sebagai pionir HAM di dunia, namun belum melakukan pengesahan beberapa kebijakan hukum untuk menghapuskan diskriminasi.

Permasalahan mengenai rasisme, diskriminasi ras, dan intoleransi menjadi ancaman serius bagi kemajuan sosial masyarakat global. Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk menyoroti perlunya usaha terus-menerus dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM dan mengatasi isu-isu diskriminasi guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

### **Pelanggaran HAM**

Amerika Serikat dan Australia memiliki sejarah yang rumit mengenai ketegangan rasial dan diskriminasi, terutama antara komunitas kulit putih dan kulit hitam di AS serta antara pemerintah dan penduduk Aborigin di Australia.

Di Amerika Serikat, sejarah ketegangan rasial telah berlangsung selama lebih dari tiga abad. Kasus George Floyd menjadi sorotan internasional karena mencerminkan kasus diskriminasi berulang yang dihadapi oleh orang kulit hitam, sering kali oleh orang kulit putih. Diskriminasi ini memiliki akar sejarah yang kompleks karena orang kulit hitam pernah menjadi budak di Amerika Serikat, yang menyebabkan pandangan berprasangka tentang mereka sebagai warga negara kelas dua. Kebijakan diskriminatif masih ada di dalam pemerintahan AS, meskipun negara ini sering dianggap sebagai pelopor hak asasi manusia global.

Protes *Black Lives Matter* yang juga terjadi di Australia menunjukkan solidaritas dengan kasus George Floyd dan Afrika-Amerika. Namun, protes tersebut juga mencerminkan tuntutan keadilan bagi penduduk Aborigin di Australia. Sejarah diskriminasi rasial di Australia telah melibatkan tindakan kekerasan oleh polisi yang menyebabkan kematian orang-orang Aborigin, seperti dalam kasus David Dungay pada tahun 2015.

Kedua negara ini, baik Amerika Serikat maupun Australia, menghadapi tantangan untuk menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negaranya. Meskipun seringkali diakui sebagai pelopor hak asasi manusia, kenyataannya adalah bahwa masih ada kebijakan diskriminatif yang belum diperbaiki di pemerintahan keduanya. Rasisme, diskriminasi rasial, dan intoleransi menimbulkan ancaman bagi kemajuan sosial global dan menuntut perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia.



## **Akhir dari bagaimana kebijakan Amerika dan Australia terkait isu Diskriminasi Rasial**

Tanpa disadari, kasus-kasus diskriminasi rasial di beberapa negara, terutama di Australia, berasal dari sejarah panjang negara tersebut dan telah menjadi konflik utama dalam masyarakat saat ini. Menyingkirkan berbagai bentuk diskriminasi rasial menjadi sulit karena terkait erat dengan pandangan sempit sebagian individu yang cenderung melihat orang lain hanya dari satu identitas. Amartya Sen berpendapat bahwa sebenarnya setiap manusia memiliki lebih dari satu identitas, sehingga tidak seharusnya seseorang dikategorikan hanya berdasarkan satu aspek identitas saja.

Melihat sesama manusia dari beragam identitas yang mereka miliki, menurut Sen, akan mengubah pola pikir yang hanya fokus pada identitas tunggal yang telah tertanam kuat pada manusia. Dengan mempertimbangkan beragam identitas yang dimiliki seseorang, bukan hanya satu identitas saja, maka bentuk-bentuk diskriminasi rasial dapat diminimalkan.